BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertumbuhan Ekonomi

1. Sekilas Tentang Pertumbuhan Ekonomi

Pemikiran ekonomi barat diakui sebagai peletak dasar pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi dalam wacana kontemporer, yang kemunculannya didasari hanya oleh perspektif ekonomi saja. Pertumbuhan didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi negara dan perubahannya dari kondisi konstan dan tetap menuju kondisi *mobile* dan dinamis dengan cara penambahan kemampuan ekonomi negara untuk merealisasikan penambahan tahunan yang dihitung dalam akumulasi devisa negara beserta perubahan jumlah dana sarana-sarana produksi, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan perhitungan pertambahan kemampuan industri beserta infrastrukturnya yang ditunukkan melalui penurunan ketergantungan pada aktivitas-aktiviatas ekonomi tradisional.[13]

Definisi ini dimaksudkan adanya perubahan bangunan ekonomi menuju ekonomi industrialis. Oleh karenanya, pertambahan tahunan yang dihitung dalam akumulasi devisa negara dan peran individu dikategorikan sebagai indikasi pokok dalam pertumbuhan. Jika pemahaman ekonomi ini dilandaskan dalam konteks negara-negara barat, maka hal itu sesungguhnya

[13] At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. "Ekonomi Isalam, Prinsip, Dasar dan Tujuan". Magistra Insania Press:2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sesuai untuk menjadi *problem solving* kondisi negara-negara Islam. Pengalaman nyata yang terjadi di negara-negara Islam pada dekade lima puluhan dan enam puluhan menjadi bukti kegagalan pemecahan persoalan melalui metode yang berlandaskan di atas pijakan filsafat politik dan ekonomi kolobnial dan teori pertumbuhan ini. Ironisme kegagalan ini tergambar dalam ketidakmampuan untuk merealisasikan bentuk ideal perubahan pasca proklamasi kemerdekaan.

Hal tersebut berkorelasi dengan timbulnya krisis pertumbuhan di negara Islam sebagai persoalan nyata. Beberapa pemahaman yang salah berkaitran dengan pertumbuhan, antara lain:

a) Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan selalu pertambahan produksi?

   Ada beberapa teori dan studi yang mengupas persoalan ini yang didasarkan atas gambaran kecenderungan sesuai dengan pengalaman barat yang membandingkan pertumbuhan di dalamnya sebagai pertambahan produksi, baik pertambahan produksi itu hasil gambaran kebutuhan masyarakat ataupun tidak. Walaupun demikian, masih dimungkinkan untuk memberikan batasan mengenai tujuan pertumbuhan ini pada tingkat tertentu sebagai pertambahan produksi. Kesalahannya adalah pertambahan produksi ini dijadikan sebagai satu-satunya tujuan pertumbuhan, karenanya hal ini mempengaruhi kemunculan berbagai persoalan. Produksi yang diposisikan sebagai elemen terpenting pertumbuhan dalam masa tertentu mengandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potensi yang dapat menghancurkan fitrah manusia. Potensi itu didasarkan atas pemahaman tentang keharusan tertentu yang mengakibatkan pembunuhan karakter manusia sebagaimana yang dianut oleh pemikiran ekonomi barat dan keharusan adanya keyakinan pertambahan produksi secara tak terbatas.

Kedua langkah ini berkaitan erat dengan kebangkitan industri kapitalis melalui ekspansi Eropa pada abad 18 dan 19. Hal tersebut merupakan pengaruh pendapat Adam Smith yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat diukur dengan komoditas dan pelayanan yang dihasilkan dan yang diabaikan. Penyebab lain adalah anggapan tokoh ini bahwa negara-negara maju merupakan negara-negara yang mampu mengambil manfaat setinggi mungkin, dimana perspektif ini tidak mengakomodasi adanya tingkat kemerosotan dan kejatuhan nilai dan moral warganya. Di sisi lain, negara-negara lainnya adalah negara-negara yang tergantung.

b) Apakah pertumbuhan merupakan sumbangsih teknologi mutakhir?

Sebagian ekonom mengkorelasikan secara signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan penemuan teknologi mutakhir dengan asumsi bahwa teknologi merupakan pengantar terciptanya kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Hasilnya kta mendengar beberapa pemimpin negara-negara Islam menyatakan bahwa sudah sangat mendesak untuk menciptakan iklim kondusif bagi kemajuan teknologi hingga seakan-akan teknologi merupakan keajaiban yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menyelesaikan segala persoalan dan ketentuan-ketentuan pertumbuhan ekonomi secara umum. Pendapat ini melupakan bahwa teknologi tidak lain adalah hasil kreasi masyarakat dan posisi teknologi sendiri bagai masyarakat merupakan sesuatu yang diperkaya oleh pengalaman diskursus dan ilmiah. Dengan demikian kemajuan teknologi di negara-negara maju merupakan bentuk wajar yang mengandung komposisi antara kemajuan, keseragaman pemikiran, budaya, dan materialisme yang berkembang di negara-negara barat. Adapun impor teknologi seperti itu ke negara-negara Isalam bukanlah merupakan sesuatu yang didasari oleh sesuatu yang alami, tetapi merupakan hal asing dan dihubungkan dengan karakter masyarakat yanf berbeda. Dengan demikian, hal tersebut tidak dapat menimbulkan kemajuan. Teknologi yang berkembang di negara-negara barat bukan emrupakan cerminan kebutuhan riil yang dihadapi negara-negara Islam. Hal itu karena teknolgi secara umum berlandaskan atas kekuatan modal, hal yang secara umum masih menjadi masalah negara-negara miskin. Hadirnya teknologi maju tanpa persesuaian dengan karakter dan kondisi negara Islam hanya akan memperkecil nilai guna teknologi itu sendiri dan hanya meciptakan “angan-angan teknologi dan penemuan-penemuan baru”.

c) Apakah pertumbuhan merupakan pertambahan di negara-negara maju?

Banyak contoh kontradiktif tentang kondisi negara-negara Islam jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Implikasinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya mempertinggi pertumbuhan dalam kebutuhan pertambahan bagi negara-negara maju, yaitu adanya limitasi bagi 'negara-negara maju' sesuai dengan aturan tertentu dengan tuntutan bahwa keunggulan ini memerlukan prasayarat kemajuan. Keadaan ini selalu menempatkan negara dan masyarakat muslim di luar negara maju yang dilabeli dengan perbandingan 'dengan yang lainnya'. Ukuran yang diberikan negara maju selalu mengabaikan karakteristik dan kondisi geografis negara muslim. Kita tidak mungkin untuk menghasilkan peradaban Eropa melalui dukungan semangat Protestad dengan berbagai plus-minusnya.

Pertumbuhan ekonomi bisa diindikasikan dengan adanya kenaikan tingkat *income* masyarakat atau individu sehingga tidak akan terdapat perbedaan atas target ekonomi yang ingin diraih oleh negara-negara maju dan berkembang. Namun, realitasnya tidaklah demikian. Negara-negara maju berkonsentrasi untuk meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan kegiatan ekonomi di negara-negara berkembang hanya terfokus pada upaya pengentasan kemiskinan atau usaha untuk mengejar keterbelakangan dan pertumbuhan.[14]

Menurut beberapa pengamat ekonomi, pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan sebuah upaya untuk meningkatkan *level of income* masyarakat dan individu dalam jangka panjang yang diiringi dengan

[14] Marthon, Said Saad. "Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global". Zikrul Hakim. Jakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminimalkan tingkat kemiskinan dan menghindari kerusakan distribusi kekayaan masyarakat.

Definisi tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan adanya kenaikan pendapatan masyarkat dan individu dalam waktu yang lama. Bagi negara berkembang, peningkatan *income* bukan merupakan satu-satunya tanda adanya pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi bisa diindikasikan dengan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Hal itu guna mengejar segala ketertinggalan, melepaskan diri dari hagemoni sistem ekonomi asing, mengatasi masalah pengangguran, kesehatan, dan mewujudkan keadilan dalam pendistribusian kekayaan. Pertumbuhan ekonomi menuntut adanya penambahan kualitas dan kuantitas produksi dalam kegiatan ekonomi serta adanya peningkatan modal dan tenaga kerja. Selain itu, diperlukan kontribusi masyarakat dalam rangka melaksanakan semua kebijakan yang ada. Dalam islam, diperlukan norma ataupun etika yang berfungsi sebagai pijakan dalam menentukan langkah-langkah untuk mengatasi problem ekonomi serta upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang didapatkan tidak hanya berupa nilai-nilai materialisme, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan moral dan nilai-nilai ruhiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam[15]

Pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi materiil dan spiritual manusia. Pertumbuhan ekonomi telah ada dalam wacana pemikiran klasik yang dibahas dalam "pemakmuran bumi" yang merupakan pemahaman dari firman Allah dalam surat Hud ayat 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya: *"Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya".*

Artinya, menjadikan kamu sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Terminology "pemakmuran tanah" mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: "hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran tanah dengan perhatian yang lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran tanah. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran tanah, negara tersebut akan hancur."

Syarat penerapan suatu system hukum adalah manakala kebutuhan mereka tercukupi. Hukuman tidak dapat dijalankan jika kebutuhan

[15] At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. "Ekonomi Isalam, Prinsip, Dasar dan Tujuan". Magistra Insania Press:2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat masih diabaikan. Pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan adanya peluang kerja. Jika hal tersebut diabaikan, maka tidak aka nada kepercayaan terhadap Islam. Jika saat ini banyak dijumpai pertumbuhan ekonomi, yaitu banyaknya apa yang diistilahkan dengan kekacauan ekonomi dan sisi pendukungnya dalam usha menciptakan masyarakat produksi, dimana langkah itu hanya menghasilkan krisis masyarakat yang dipenuhi dengan banyaknya kekacauan ekonomi, konsumsi barang yang tidak dapat diproduksi, atau kehancuran pondasi ekonomi, maka hal ini sesungguhnya telah diperingatkan oleh al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Kaum muslim generasi pertama telah mampu mewujudkan kemajuan mereka di bawah bimbingan al-Quran, oleh karena itu tidak mengherankan jika berbagai karya hasil tentang ekonomi dunia dalam pertumbuhan ekonomi adalah hasil karya kaum muslim yang jauh mendahului karya-karya barat saat ini. Secara khusus dapat disebutkan nama Ibnu Khaldun yang telah menyinggung terminology pembangunan ekonomi dalam bukunya yang terkenal *Muqaddimah* tahun 784 H dalam bab tentang "peradaban dan cara mewujudkannya".

Dalam pengalaman perbankan Islam dan pengalaman pemerintahan Islam yang telah ditelan sejarah dengan merujuk pada berbagai karya pemikir dan peneliti Islam, mennjukkan bahwa persoalan bermacam pertumbuhan dimungkinkan adanya satu solusi inovatif yang baru dari sisi pandangan Islam tentang pertumbuhan. Berikut ini akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipaparkan beberapa pemahaman pokok bahwa pengetahuan dan pemahaman pertumbuhan ekonomi perlu dilihat dari perspektif Islam.

a) Batasan tentang persoalan ekonomi

Perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi adalah persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Islam juga tidak melihat persoalan ekonomi sebagai persoalan persoalan pertentangan produksi dan distribusinya saja sebagaimana yang dianut oleh Marxisme. Sebelum adanya persoalan yang dihadapi manusia, kekayaan alam dan persoalan produksi tidak ada. Oleh karena inilah, seluruh ajaran Islam hadir untuk mengatur aktivitas kerja dan produksi. Bahkan, Islam menempatkan usaha untuk mencari rizki dan pengembangannya sebagai bagian ibadah yang paling utama.

b) Tujuan produksi

Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan sebagai tujuan pokok, walaupun kandungan tujuan-tujuannya masuk di dalamnya. Dari sisi lain, Islam mendorong agar produk masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok semua anggotanya dengan sejumlah komoditas yang memang dibutuhkan dalam tingkat berimbang bagi keseluruhan untuk mendapatkannya. Potensi kekuatan yang mampu memenuhinya tidak boleh dialihkan kepada bidang produksi lain. Kebutuhan itu sendiri dalam pandangan Islam mempunyai keharusan rotasi dalam pergerakan produksi sebagaimana keharusan rotasi dalam kekuatan ekonomi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber kapitalnya. Dengan kata lain, kebutuhan-kebutuhan pokok ini dari kebutuhan umum masyarakat dunia Islam adalah pangan, sandang, papan, air minum, perabotan rumah tangga, srana pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

c) Watak pertumbuhan ekonomi Islam

Metode Islam tentang pertumbuhan berkaitan erat dalam semua ketetapan dan rincian-rinciannya. Dengan rotasinya, metode itu merupakan bentuk umum kehidupan. Bentuk ini memiliki biaya penyimpanan yang khusus. Dasar atau pondasi masyarakat Islam secara umum terdiri dari beberapa aspek, antara lain:

- Akidah, merupakan kaidah inti dalam pemikiran Islam yang memberikan panduan umum bagi kaum muslim untuk melihat dunia, manusia, dan kehidupan.
- Pemahaman-pemahaman yang menjadi alat analisa dalam perspektif Islam untuk menafsirkan segala sesuatu atas dasar pandangan umum yang berpokok pada akidah.
- Perasaan yang didorong dan ditumbuhkan oleh pengaruh Islam pada pemahaman-pemahaman tersebut, karena pemahaman-pemahaman ini terpancar dalam diri seorang muslim sebagai perasaan khusus yang mengarah pada keadaan itu dan memberikan batasan perasaan sepadan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kita tidak akan mampu untuk memunculkan semua sisi terkait jika interaksi antara pertumbuhan ekonomi Islam dan semua unsur lain tidak digabungkan. Ringkasannya dapat dilihat sebagai berikut:

- Kaitan antara metode Islam tentang pertumbuhan dengan akidah yang merupakan sumber pijakan spiritual bagi metode ini. Akidah akan memberikan panduan praksis bagi seorang muslim sesuai dengan metode. Aturan yang bersumber dari akidah ini sesuai dengan tabiat keimanan dan nilai esensial kemanusiaan. Kekuatan kandungan pelaksanaan, watak imaniyah dan ruhiyah, serta ketenangan jiwa merupakan nilai lebih yang akan memperkaya metode ini dalam tabiat khususnya.
- Kaitan antara metode Islam tentang pertumbuhan dengan pandangan Islam tentang dunia, kemanusiaan, kehidupan, dan cara khasnya untuk menafsirkan sesuatu, seperti pemahaman Islam tentang kepemilikan khusus dan profit. Dalam pemahaman Islam secara khusus, kepemilikan mempunyai korelasi dengan bagaimana hak kepemilikan itu dipergunakan dan dibatasi sesuai dengan bidang yang diatur Islam. Ekonomi Islam juga mempengaruhi pemahaman Islam tentang profit dengan tingkat yang dibatasi oleh kedalaman dan pemusatan pemahaman. Pemahaman ini selanjutnya memberikan pengaruh bagi berlakunya metode Islam dalam pertumbuhan dan implementasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Kaitan antara metode Islam tentang pertumbuhan dengan perasaan yang diajarkan Islam tentang masyarakat yang dilandaskan atas pemahaman khusus, seperti perasaan persaudaraan antar kaum muslim yang terpatri di hati setiap muslim yang bersumber dari rasa cinta kepada orang lain. Perasaan ini akan melahirkan perputaran pokok dan penting dalam aktivitas kehidupan ekonomi dan menaikkan metode Islam tentang pertumbuhan kedalam muara-muara yang akan dituju.
- Kaitan antara metode Islam tentang pertumbuhan dengan kebijakan moneter negara Islam pada tingkat yang menempatkan kebijakan moneter sebagai bagian metode ini. Hal ini karena kebijakan monter yang ada didasarkan atas dasar keimanan dan berlaku untuk menciptakan tujuan-tujuan pertumbuhan ekonomi Islam. Kebijakan moneter dalam Islam tidak cukup hanya dengan pelaksanaan kewajiban oleh negara, namun juga ditujukan untuk menciptakan keberimbangan dan jaminan social.
- Kaitan antara metode Islam tentang pertumbuhan dengan hukum pidana Islam. Aturan hukum hanya dapat dijalankan ketika masyarakat telah berada dalam level yang sama. Misalnya hukuman potong tangan bagi pencuri jika diukur dengan aturan sebagaimana dalam masyarakat kapitalis akan meninggalkan banyak persoalan bagi anggota masyarakat. Namun, dalam pandangan masyarkat Islam terdapat pendidikan yang baik bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertumbuhan ekonomi Islam dan masyarakat yang hidup dalam naungan Islam.

- Kaitan antara metode Islam tentang pertumbuhan dengan moralitas. Hal ini karena Islam tidak memasukkan tujuan-tujuan yang ingin direalisasikan dalam kehidupan ekonomi masyarakat hanya sebagai tujuan materi dan persyaratan tabiatnya yang terpisah dari manusia, sebagaimana paham Marxisme yang tujuannya adalah kekuatan dan fungsi produksi. Islam melihat tujuan-tujuan itu dengan sifatnya yang menunjukkan ketinggian nilain implementatif sebagai pokok penciptaan pertumbuhan dari sisi moralitas. Ketika Islam menetapkan jaminan kehidupan pekerja misalnya dia tidak meyakini bahwa jaminan social ini diadakan oleh Islam, maka hal itu menunjukkan seseorang hanya menilai pertumbuhan dari sisi materi produksi.

Islam memiliki beberapa karakteristik yang mencirikan pertumbuhannya, antara lain serba meliputi, berimbang, realistis, berkeadilan, tanggung jawab, mencukupi, dan berfokus pada manusia sesuai dengan haknya sebagai duta Allah di muka bumi.

a) Serba meliputi

Jika beberapa aturan buatan manusia, khususnya aturan kontemporer dalam kontribusinya untuk menciptakan aturan yang dapat mengatasi persoalan kemiskinan dan keterbelakangan menyisakan beberapa persoalan, yaitu secara umum tidak beranjak dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anjurannya untuk menciptakan aturan yang berlandaskan atas distribusi yang menyisakan kesenjangan antara kelompok-kelompok itu, begitu juga dengan adanya diskrimasi hukum yang berlaku pada beberapa kasus sebab tidak adanya akses terhadap distribusi ini, maka Islam sesungguhnya telah menyisakan satu mekanisme distribusi barang-barang ekonomis segabai hasil dan bagian yang didistribusikan antar manusia tanpa adanya diskriminasi, baik atas dasar suku, ras, maupun agama. Hal ini dikarenakan adanya satu ketetapan bahwa pelaksanaan acuan dalam aturan-aturan yang dibuat manusia terkadang menimbulkan akibat gradasi kemudahan bagi masyarakat ,miskin. Acuan ini hanya melihat dari sisi lain bahwa aturan yang dihasilkan oleh para ilmuwan mereka sangat jauh dari penciptaan tujuan nilai yang diinginkan, mengingat aturan-aturan itu kehilangan sisi serba meliputi bagi persoalan yang ada. Aturan itu hanya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lain hanya persoalan materi.

Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh system-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan social. Dalam sebagian aturan ciptaan manusia, negara menjamin satu kelompok untuk mengakses pekerjaan dalam bidang sandang-pangan namun tidak memberikan kesempatan yang sama kepada kelompok lain. Hal itu kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan kepincangan budaya secara umum. Islam berada dalam posisi lebih utama dimana yang ingin diciptakan adalah masyarakat yang sempurna dari semua aspek. Masyarakat yang mencerminkan jaminan keadilan social dalam aturan-aturan buatan manusia hadir dalam bentuk yang hambar jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan penting yang ingin dijaga oleh Islam secara esensi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang sempurna. Artinya masyarakat yang didalamnya tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya. Pada dasarnya, kebutuhan manusia dalam sisi ruhiyah lebih penting dibandingkan dengan kebutuhan materi.

b) Berimbang

Pertumbuhan ekonomi Islam tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun ditujukan berlandaskan asas keadilan distribusi, sesuai dengan firman Allah dalam surat Almaidah ayat 8 yang berbunyi:

ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ

Artinya: *"Berbuat adilah kamu sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketaatan."*

Tujuan pertumbuhan ekonomi dalam Islam adalah adanya kesempatan semua anggota masyarakat, apapun ras, agama, dan karakternya untuk mendapatkan kecukupan, bukan kekurangan. Ibadah tidak hanya berupa shalat atau menghadap Allah saja, namun harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga menjadi dasar untuk membantu oaring lain dan mengulurka pertolongan kepada orang yang membutuhkan.

Oleh karena itu, Islam tidak mengakomodasi pertumbuhan model kapitalis yang ditujukan demi pertumbuhan kekayaan masyarakat tanpa memperhatikan distribusi kekayaan tersebut, dan pertumbuhan hanya dilihat sebagai sesuatu yang selalu mengikuti proses produksi. Posis berimbang dalam pertumbuhan ekonomi memerlukan adanya keberimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh karena itu, Islam tidak menerima langkah kebijakan pertumbuhan perkotaan yang mengabaikan pedesaan, industry yang mengabaikan pertanian, mendahulukan kebutuhan tersier dan sekunder di atas kebutuhan pokok dan primer, mengutamakan pembanguna industry berat di atas industry ringan, atau dengan mengkonsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan saran umum dan prasarana pokok lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai keberimbangan di negara-negara Islam merupaka sumber yamg menjadi bagian ketidakmerataan ekonomi negara. Bahkan, pertumbuhan sesungguhnya merupakan pertumbuhan mundur karena semakin banyaknya ketidakmerataan di tengah masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Realistis

Kajian tentang sifat realistis Islam dalam bidang pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk mencapai keadaan paling baik dan produksi paling sempurna yang masih mungkin dicapai manusia dalam sisi ekonominya. Sifat realistis dalam bidang pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa Islam melihat persoalan ekonomi dan social yang mungkn terjadi di masyarakat Islam dengan tawaran solusi yang juga realistis. Contoh sifat realistis sekaligus idealis Islam adalah cara pemecahan persoalan kemiskinan. Dari sisi realitisnya, Islam menawarkan aturan zakat untuk menanggulangi kemiskinan.

d) Keadilan

Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dalam banyak ayat al-Quran. Allah berfirman dalam surat Annahl ayat 90:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ
وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu mendapat pelajaran."*

Hal ini dapat ditemukan secara jelas dalam bidang moneter dari sudut pandang idealitas. Islam telah menjamin terwujudnya keadilan di antara manusia dalam usaha untuk memperbesar pemasukan dan distribusinya antara karum muslim dengan golongan non-muslim. Dalam bidang perpajakan, Islam telah mewajibkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada golongan kaya untuk memberikan sejumlah harta yang telah ditentukan kepada golongan miskin sebagai hak mereka.

Keadilan ini juga Nampak secara jelas sekali dalam bidang distribusinya. Beberapa pemimpin Islam telah menetapkan beberapa pedoman khusus yang mengatur alokasinya diantara manusia secara adil. Abu Ubaid yang meriwayatkan dari sufyan bin Wahab al Khawali menyatakan, “saya menyaksikan khutbah Umar bin Khattab dalam masalah penarikan income. Setelah memuji dan bersyukur kepada Allah, Umar berkata “ harta rampasan ini merupakan sesuatu yang diberikan Allah kepada kalian, yang mulia dan yang rendah. Rasulullah dan Khulafaur Rsyidin menjaga terciptanya keadilan antar manusia. Mereka tidak melakukan diskriminasi kepada golongan manusia lain dengan memberikan sesuatu, karena hal itu hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan terhadap pemasukan pajak yang telah dikumpulkan.

e) Tanggung jawab

Para ahli fikih telah memformulasikan adanya satu mewajibkan bagi seorang yang berkecukupan untuk memberikan nafkah kepada saudaranya yang membutuhkan, walaupun mereka berbeda tentang cakupan bobot wajib ini atas pertimbangan tingkat persaudaraan. Karena merupakan bagian kewajiban bidang keuangan yang ditetapkan oleh Allah bagi kaum miskin, maka negara harus bertanggung jawab terhadap golongan miskin, anak yatim dan janda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Orang miskin berhak untuk menuntut diberikannya nafkah oleh negara jika tidak ada seorangpun yang dapat menyediakan untuknya. Tanggung jawab ini merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap semua anggota masyaraktnya.

Nabi telah memproklamirkan adanya tanggung jawab negara terhadap anak-anak: "Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk ahli warisnya. Dan barangsiapa yang meninggalkan anak (yang tidak ada pengasuh dan biaya perawatan), maka ia adalah kewajiban kita." Begitu juga yang terjadi pada masa Umar bin Khattab ketika memegang tampik kepemimpinan, ia segera menetapkan kewajiban tanggung jawab ini.

Demikianlah dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dalam Islam sangat jelas. Setiap individu memiliki tanggung jawab, dan negara juga memiliki tanggung jawab. Setiap manusia akan dimintai tangung jawab atas kepercayaan yang diberikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW.

f) Mencukupi

Para ahli fikih telah menetapkan dalam bidang pengalokasian harta dengan ukuran yang dapat mencukupi kebutuhan berupa pangan, sandang, papan dalam batas seharusnya. Mereka juga menetapkan jika terdapat seorang kerabat yang sedang membutuhkan pekerjaan, maka kerabat lainnya berkecukupan wajib untuk memberikan pekerjaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan upah yang harus dibayarkan. Jika zakat yang diandalkan sebagai pemasukan untuk mengatasi kemiskinan, maka apa yang akan kita lakukan jika ternyata zakat itu tidak dapat mencukupi tuntutan yang ada? Apakah kita akan meninggalkan mereka yang sedang kelaparan dengan kelaparannya dan mereka yang lagi sakit dengan penderitaanya? Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab secara menyeluruh. Tanggung jawab ini pada mulanya diwujudkan dalam bentuk kewajiban zakat. Jika harta zakat ini tidak mencukupi, maka golongan kaya berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi golongan miskin hingga mereka dapat hidup dengan wajar.

g) Berfokus pada manusia

Karakter ini sesuai deng posisi manusia yang merupakan duta Allah di muka bumi dan inilah yang mencirikan tujuan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi dalm Islam. Hal ini berbeda dengan tujuan system lain. Tujuan pertumbuhan ekonomi kapitalis adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dengan lebih mementingkan pemenuhan produksi kebutuhan sekunder dan tersier yang dibutuhkan oleh kalangan borjuis, kapitalis, dan pemilik modal sebagaimana yang ada di masyarakat barat, dibandingkan dengan produksi untuk kebutuhan primer. Pertumbuhan ekonomi dalam system sosialis adalah kesetaraan, bukan keuntungansebagaimana yang dianut olehsistem kapitalis. Hanya saja hal itu tidak lain untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhan negara sesuai dengan kehendak para pemimpin partai dan para pengambil keputusan, bukan dilandaskan atas kebutuhan warga negara itu sendiri dengan menekankan kepentingan bersama melalui pembatasan kebebasan pribadi. Manusia hanyalah merupakan alat dan instrument, bukan tujuan.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Islam tidaklah ditujukan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana dalam system kapitalis atau untuk kepentingan para pemimpin partai sebagaimana dalam system sosialis. Namun, pertumbuhan itu ditujukan untuk menciptakan batas kecukupan bagi seluruh warna negara agar ia terbebas dari segala bentuk penghambaan, baik dalam bidang finansial ataupun hukum kecuali hanya penghambaan pada Allah semata. Focus pertumbuhan ekonomi Islam tidak lain adalah manusia itu sendiri agar tidak diperbudak materi sebagaimana dalam ekonomi kapitalis dan menjadi hina karena tidak memiliki kebebasan sebagaimana dalam ekonomi sosialis, namun agar manusia memiliki kebebasan bertabur kemuliaan untuk memakmurkan dunia dan menghidupkannya dengan aktivitas penuh nilai guna. Ia kemudian dapat memfungsikan hak sebagai duta Allah di muka bumi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Sekilas tentang UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.[16]

Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- . Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

Sektor usaha mikro kecil dan menengah di indonesia sangat potensial dikembangkan. Karena sektor ini terbukti memberikan kontribusi 57,12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian

[16] Bagian Data-Biro Perencanaan, Narasi Statistic UMKM 2010-2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi dan UMKM jumlah UMKM di Indonesia kini mencapai 55,2 juta unit atau 99,98 persen dari total unit usaha Indonesia.

Bahkan sektor ini telah menyerap 101,72 juta orang tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Sektor UMKM telah terbukti menopang perekonomian nasional, menyediakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kinerja UMKM diharapkan dapat terus dipertahankan melalui pengembangan kreatifitas dan inovasi dalam memproduksi terutama motif, desain dan pewarnaan agar bersaing di pasar internasional. Bahkan UMKM diminta berani mendaftarkan merk dan *brand* produk yang dihasilkan agar bisa terlindungi.

Adanya pameran koperasi dan UMKM festival dapat dijadikan jendela pemasaran berbagai produk kreatif unggulan dari seluruh Indonesia dan mampu memotivasi masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan eknomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah kedepan perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. Pengembangan UMKM kedepan, perlu menggabungkan keunggulan lokal (lingkungan internal) dan peluang pasar global, yang disinergikan dengan era otonomi daerah dan pasar bebas.Perlu berpikir dalam skala global dan bertindak lokal (*think globaly and act locally*) dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan pengembangan UMKM.

2. Perkembangan UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah pada mulanya tidak mengalami kemajuan yang sangat berarti baik dari segi kuantitas maupun dari kualitas, karena pada saat itu belum terdapat perhatian yang serius dari pihak-pihak yang berwenang, perhatian hanya diarahkan sebagai bentuk formalitas saja. Tapi sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997/1998 di mana UMKM ternyata mempunyai ketahanan yang relatif baik dibanding usaha besar, maka pihak-pihak yang berwenang sudah mulai sangat memperhatikan terhadap perkembangan UMKM baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Adapun perkembangan UMKM di Indonesia sudah cukup pesat menurut BPS pada tahun 2007 ada sebanyak 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut ternyata pada tahun 2007 UMKM mampu mendukung Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 6,3 persen terhadap tahun 2006, bila dirinci menurut skala usaha pertumbuhan PDB usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai 6,4 persen dari usaha besar (UB) tumbuh 6,2 persen. Dibanding tahun 2006 pertumbuhan UMKM hanya 5,7 persen dan PDB hanya 5,2 persen.

Pada tahun 2007 total nilai PDB Indonesia mencapai Rp.3.957,4 triliun, dimana UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp.2.121,3 triliun atau 53,6 persen dari PDB Indonesia. Pertumbuhan PDB UMKM tahun 2007 ini terjadi disemua sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 9,3 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran 8,5 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,8 persen. Adapun hasil eksport produksi UMKM selama tahun 2007 mencapai Rp.142,8 triliun atau 20 persen terhadap total eksport non-migas nasional sebesar Rp.713,4 triliun. [17]

Perkembangan UMKM ini tidak terlepas adanya dukungan dari pihak pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terutama melalui aturan-aturan yang dikeluarkan misalnya, adanya undang-undang tentang Bank Indonesia sejak 16 Nopember 1999, yang mendukung pengembangan UMKM melalui pemberian kredit. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai gambaran, kendati

[17] Kompas:2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumbangannya dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan dalam ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun UMKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam kenyataannya selama ini UMKM kurang mendapatkan perhatian. Dapat dikatakan bahwa kesadaran akan pentingnya UMKM dapat dikatakan barulah muncul belakangan ini saja. Usaha Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UMKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UMKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar.

Dalam banyak kasus, dari sejumlah UMKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi. Sejak krisis moneter yang diawali tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Berbeda dengan UMKM yang tetap bertahan di dalam krisis dengan segala keterbatasannya. UMKM dianggap sektor usaha yang tidak cengeng dan tahan banting. Selain itu sebagai sektor usaha yang dijalankan dalam tataran bawah, UMKM berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran, bahkan fenomena PHK menjadikan para pekerja yang menjadi korban dipaksa untuk berfikir lebih jauh dan banyak yang beralih melirik sektor UMKM ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk-produk UMKM, setidaknya memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, karena tidak sedikit produk-produk UMKM itu yang mampu menembus pasar internasional. Sekarang ini lembaga-lembaga donor internasional semuanya mendukung perkembangan UMKM. Ada yang melihatnya sebagai wahana untuk menciptakan kesempatan kerja (ILO), ada yang melihatnya sebagai penjabaran komitmen mereka (IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia) untuk memerangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Di Asia, perkembangan sektor UMKM ini juga dilihat sebagai salah suatu jalan keluar dari krisis ekonomi. Para donor multilateral dan bilateral (antara lain Jepang) semuanya akan menyediakan dana dan bantuan teknis untuk pengembangan sektor ini.

C. Perbankan Syariah

1. Sekilas tentang Perbankan Syariah

Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan konvensional lainnya di Indonesia adalah lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan. Oleh karena itu lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk turut menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan di Indonesia.[18]

[18] Djamil, Faturrahman. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”. Sinar Grafika:2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkembangan sistem ekonomi syariah dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia terlihat semakin pesat. Fenomena bank syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang operasinya diresmikan pada 1 Mei 1992. Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia. Kemudian Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan hasil konversi sistem operasi perbankan dari konvensional ke sistem syariah yang pada 19 November 1999 resmi mengikuti Bank Muamalat dalam menerapkan sistem syariah. Melalui dengan Dual Banking System, artinya suatu badan usaha perbankan memiliki dua sistem operasinal sekaligus yaitu konvensional dan syariah, pertumbuhan lembaga perbankan syariah semakin meningkat. Ada beberapa bank umum syariah saat ini yang awalnya hanya membuka Unit Usaha Syariah lalu kemudian bermetamorposis menjadi Bank Umum Syariah diantaranya misalnya BNI Syariah dan BRI Syariah.

Proses pembentukan bank syariah di Indonesia setidaknya melalui tiga cara, yaitu:

1. Mendirikan bank syariah secara langsung dengan full sistem syariah seperti halnya Bank Muamalat Indonesia (BMI),
2. Melakukan konversi dari bank konvensional ke bank syariah. Inipun biasanya menggunakan full sistem syariah. Hal ini terjadi pada Bank Syariah Mandiri (BSM) yang awalnya adalah bank konvensional, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Membuka divisi syariah, biasanya adalah bank konvensional yang tertarik melakukan transaksi syariah, hal ini dilakukan dengan cara membuka divisi syariah dengan menggunakan dual banking system.

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang berupa pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah melalui perubahan Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 yang mengatur tentang landasan hukum dan jenis-jenis 11 usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah berdampak signifikant terhadap pertambahan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Tabel 2 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Kelompok Bank	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Bank Umum Syariah	3	3	3	5	6	10
Unit Usaha Syariah	19	20	26	27	25	23
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	92	105	114	131	138	146
Total Jumlah Kantor	550	636	782	1,024	1,223	1,640

Dalam operasionalnya, perbankan syariah mempunyai beberapa target dan tujuan yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Di antara keistimewaannya adalah sebagai berikut:[19]

[19] Marthon, Said Saad. “Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global”. Zikrul Hakim. Jakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama perbankan syariah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut, kegiatan perbankan terfokus pada kegiatan produksi baik dalam perindustrian, pertanian, maupun perdagangan.
2. Mencegah *capital flight.* Seperti yang kita lihat, *capital* yang dimiliki oleh seorang Muslim dilarikan ke nagara-negara non-Muslim untuk mendapatkan suku bunga pada level tertentu.
3. Jaminan sosial dan pemerataan kekayaan. Dengan adanya pengelolaan zakat, diharapkan dana yang telah terkumpul dapat didistribusikan kembali kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Dengan demikian, kebutuhan fakir-miskin bisa terap terjaga dana dapat meminimalisir tindak kejahatan.
4. Prinsip operasional perbankan syariah menggunakan nilai-nilai syariah sehingga memungkinkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.
5. Dalam perbankan syariah terdapat dewan pengawas atas keabsahan transaksi atau operasional yang ada.

Seiring dengan keistimewaan perbankan syariah, terdapat beberapa faktor dan kondisi yang dapat menghambat pertumbuhan perbankan syariah, yaitu:[20]

[20] Marthon, Said Saad. “Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global”. Zikrul Hakim. Jakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tidak ada atau kurangnya pemahaman yang komperensif dari masyarakat tentang mekanisme dan operasional perbankan syariah.
2. Belum terdapat Undang-ndang independen yang mengatur tentang operasional perbankan syariah secara utuh. Perbankan syariah masih menggunakan Undang-Undang perbankan konvensional di beberapa negara.
3. Adanya hagemoni perbankan konvensional dalam pasar. *Market share* perbankan syariah relatif masih kecil.
4. Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah masih memerlukan *adjusment* (penyesuaian) terhadap kondisi yang ada.
5. Minimnya sumber daya manusia sebagai tenaga pengelola perbankan syariah.
6. Masyarakat belum bisa menerima sepenuhnya akad-akad yang ditawarkan, seperti *Murabahah* dan *Mudharabah* yang masih terdapat perdebatan.
7. Terkadang, masih terdapat tindakan yang tidak konsisten dari operasional perbankan syariah.

Dengan adanya hambatan dan tantangan tersebut, maka akan memotivasi pertumbuhan perbankan syariah untuk melangkah lebih baik dengan melakukan pembenahan dan pengembangan pelayanan.

2. Perkembangan Perbankan Syariah (Aset dan Dana Pihak Ketiga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan per Juni 2015 industri perbankan syariah memiliki total aset sebesar Rp. 273.494 Triliun dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pangsa pasar 4,61%. Data tersebut terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS. Khusus untuk wilayah provinsi DKI Jakarta total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing masing sebesar Rp. 201.379 Triliun, Rp. 85.410 Triliun, Rp. 110.509 Triliun. Industri perbankan dan keuangan Syariah nasional perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi publik (*campaign*) agar produk serta jasa layanan Syariah yang semakin beragam dan berdaya saing dapat dikenal dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia bulan September 2010, secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah cukup membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Semenjak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 sampai 2005 hanya ada 3 Bank Umum Syariah, 19 Unit Usaha Syariah, 92 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan total jumlah kantor baru mencapai 550. Dalam rentang lima tahun, dari tahun 2005 sampai 2010, pertumbuhan perbankan syariah lebih dari dua kali lipat. Jumlah Bank Umum Syariah saat ini telah mencapai 10 unit dengan 23 Unit Usaha Syariah. Selain itu jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah mencapai 146 unit dan total jumlah kantor syariah mencapai 1,640 unit pada saat yang sama.

Tabel 3 di bawah menunjukkan perkembangan terakhir indikator-indikator utama perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asset perbankan syariah meningkat secara signifikan dari Rp 20,880 milyar tahun 2005 menjadi Rp 83,454 milyar pada September 2010. Sementara itu Dana Pihak Ketiga dan Jumlah pembiayaan mencapai masing-masing Rp 63,912 milyar dan Rp 60,970 milyar. Jika dilihat dari rasio pembiayaan yang disalurkan dengan besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang dinyatakan dalam *Financing to Deposit Ratio* (FDR), maka bank syariah memiliki rata-rata FDR hampir mencapai 100 persen. Ini mengindikasikan bahwa dana masyarakat yang dikelola oleh perbankan syariah disalurkan secara langsung ke sektor-sektor produktif. Salah satu keunggulan perbankan syariah dari data yang ditunjukkan oleh tabel 2 di atas bahwa meskipun tingkat FDR yang hampir rata-rata mencapai 100 persen, tetapi tingkat kegagalan bayar atau *Non Performing Financing* (NPF) hanya sekitar rata-rata 4 persen.

Tabel 3. Indikator Utama Perbankan Syariah (dalam miliar)

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Aset	20,880	28,722	36,537	49,555	66,090	83,454
DPK	15,593	20,672	28,012	36,852	52,271	63,912
Pembiayaan	15,270	20,445	27,944	38,198	46,886	60,970
FDR	97.76%	98.90%	99.76%	103.65%	89.70%	95.40%
NPF	0.03%	4.75%	4.07%	3.95%	4.01%	3.95%

Meskipun pangsa pasar perbankan syariah yang pada tahun 2010 ini belum bisa mencapai target BI sebesar 5 persen, tetapi pelaku perbankan syariah optimis dengan kondisi ekonomi Indonesia yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup stabil serta semangat tinggi bank-bank konvensional yang berminat untuk masuk ke Industri perbankan syariah baik dengan cara konversi ataupun membuka unit usaha syariah (UUS). Faktor lain yang akan mendukung geliat pertumbuhan industri perbankan syariah adalah faktor regulasi yaitu Undang-Undang NO. 42 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengatur tentang pajak transaksi perbankan syariah.

3. Pembiayaan Perbankan Syariah

Pada dasarnya fungsi utama Bank Syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk komsumsi.

Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai litertur yang ada sebagai berikut, Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut M. Syafii Antonio, praktisi ekonomi syariah, Bank Syariah berangkat dari teori ke praktek. Pembiayaan adalah pemberian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya yaitu:

a) Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer Of Property*), tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

- Pembiayaan *Murabahah*
- Pembiayaan Salam
- Pembiayaan Istisnah

b) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi Ijarah dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksi adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

c) Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

- Pembiayaan *Musyarakah*
- Pembiayaan *Mudharabah*

d) Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

- *Hiwalah* (Alih Hutang-Piutang)
- *Rahn* (Gadai)
- *Qardh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Wakalah* (Perwakilan)
- *Kafalah* (Garansi Bank)

Sedangkan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

a) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
b) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id